

**INTERPRETASI HAKIM MENETAPKAN PERBUATAN MELAWAN  
HUKUM DALAM PEMBATALAN HIBAH DAN PERAN  
NOTARIS DALAM PENCEGAHANNYA**  
(STUDI PUTUSAN NOMOR 85/PDT.G/2021/PN BDG JO. PUTUSAN NOMOR  
14/PDT/2022/PT BDG JO. PUTUSAN NOMOR 3013 K/PDT/2022)

**Oleh: Hayyuning Nosa Vedatalitha\*, Antari Innaka Turingsih\*\***

**INTISARI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana hakim menerapkan interpretasi hukum dalam menetapkan perbuatan melawan hukum terhadap penerima hibah yang melakukan penipuan dan penyalahgunaan keadaan sehingga hibah dapat dibatalkan. Selain itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya preventif yang dapat dilakukan Notaris untuk memastikan pemahaman penuh dan kebebasan kehendak pemberi hibah guna mencegah terjadinya penipuan dan penyalahgunaan keadaan dalam pembuatan akta hibah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data primer berupa wawancara kepada narasumber yang dilaksanakan secara langsung terhadap narasumber yang memiliki kompetensi di bidang hukum perdata yaitu hakim dan akademisi, serta wawancara langsung kepada responden dengan kriteria yang telah penulis tetapkan. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data yang didapatkan kemudian dianalisis dengan metode kualitatif.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Bandung dan Mahkamah Agung dalam memutus perkara perbuatan melawan hukum terkait pembatalan hibah menggunakan metode interpretasi. Hakim Pengadilan Negeri Bandung dan Mahkamah Agung menerapkan interpretasi sistematis dengan melihat keterkaitan antar pasal yang berkaitan guna memahami struktur hukum perjanjian secara menyeluruh, serta menerapkan interpretasi teleologis untuk melihat tujuan dari pembentukan undang-undang. Hakim mengaitkan bukti tekanan psikis, penyalahgunaan keadaan, dan penipuan perdata dengan prinsip kehendak bebas, kepatutan, dan itikad baik. Gabungan metode ini menunjukkan bahwa putusan tidak hanya berpijak pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan konteks, asas hukum, dan nilai keadilan. Sejalan dengan peran hakim di tahap sengketa, notaris memiliki tanggung jawab preventif di tahap awal. Upaya yang dapat dilakukan Notaris untuk mencegah terjadinya penipuan dan penyalahgunaan kehendak pemberi hibah mencakup komunikasi langsung untuk menggali kesadaran dan kehendak bebas pemberi hibah, memberikan penjelasan mengenai konsekuensi hukum dari hibah, serta membacakan akta secara utuh sebelum penandatanganan. Ketiga langkah ini menjadi bagian penting dalam mencegah cacat kehendak dalam pembuatan akta.

*Kata Kunci: interpretasi hakim, perbuatan melawan hukum, pembatalan hibah, peran notaris.*

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (hayyuningnosavedatalitha@mail.ugm.ac.id)

<sup>2</sup> Dosen Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

**JUDGE'S INTERPRETATION DETERMINING UNLAWFUL ACT IN  
CANCELLATION OF DEED OF GRANT AND THE ROLE OF  
NOTARY PUBLIC IN PREVENTING IT**

(STUDY CASE 85/PDT.G/2021/PN BDG JO. PUTUSAN NOMOR  
14/PDT/2022/PT BDG JO. PUTUSAN NOMOR 3013 K/PDT/2022)

**By: Hayyuning Nosa Vedatalitha\*, Antari Innaka Turingsih\*\***

*Abstract*

*This study aims to examine and analyze how judges apply legal interpretation in determining unlawful acts against grantees who commit fraud and abuse of circumstances, resulting in the cancellation of the grant. Furthermore, this study aims to determine preventive measures that notaries can take to ensure full understanding and freedom of will by the grantor, thus preventing fraud and abuse of circumstances in the preparation of a deed of gift.*

*This study utilizes descriptive, empirical normative research. The data used are primary data in the form of interviews with sources competent in civil law, namely judges and academics, as well as direct interviews with respondents who met the author's established criteria. This study also utilizes secondary data, including primary, secondary, and tertiary legal materials. The data obtained were then analyzed using qualitative methods.*

*The results of this study indicate that judges at the Bandung District Court and the Supreme Court used interpretation methods in deciding cases of unlawful acts related to the cancellation of grants. Judges at the Bandung District Court and the Supreme Court applied systematic interpretation by examining the interrelationships between related articles to understand the overall legal structure of the agreement, and also applied teleological interpretation to examine the purpose of the law. Judges link evidence of psychological pressure, abuse of circumstance, and civil fraud to the principles of free will, propriety, and good faith. This combination of methods demonstrates that decisions are based not only on legal texts but also on context, legal principles, and values of justice. In line with the judge's role in the dispute stage, notaries have a preventive responsibility at the initial stage. Efforts that notaries can take to prevent fraud and abuse of the donor's will include direct communication to elicit the donor's awareness and free will, providing an explanation of the legal consequences of the gift, and reading the deed in its entirety before signing. These three steps are crucial in preventing defects in will in the creation of a deed.*

*Keywords: judge's interpretation, unlawful acts, cancellation of gifts inter vivos, role of notaries.*

---

<sup>3</sup> Graduate Student of the Master of Notary Program, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada ([hayyuningnosavedatalitha@mail.ugm.ac.id](mailto:hayyuningnosavedatalitha@mail.ugm.ac.id))

<sup>4</sup> Lecturer, Master of Notary Program, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada